

Komunikasi Politik Islam di Iran

Ihsanul Fatta, Anang Anas Azhar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia

Email: ihsanul4004253027@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes Islamic political communication in Iran, focusing on its characteristics as an Islamic Republic, the role of the 1979 Islamic Revolution, the concept of wilayat al-faqih, and the function of symbols of resistance. Using a qualitative approach based on library research and content analysis, this study finds that Islamic political communication in Iran is built through the integration of Islamic values, state institutions, clerics, media, and society. The 1979 Islamic Revolution serves as the historical foundation for the formation of political identity, religious communication networks, and an Islamic value-based political communication culture. The concept of wilayat al-faqih functions as a source of religious-political legitimacy as well as a center of ideological communication connecting the state and society. Symbols of resistance originating from the Karbala narrative, the struggle of Imam Husain, the concept of martyrdom, and the defense of the oppressed play a role in building collective identity, shaping public opinion, and strengthening the political legitimacy of the state. The findings show that Islamic political communication in Iran combines religion, media, ideology, and power to maintain the political stability and sustainability of the Islamic Republic of Iran. This study enriches the development of Islamic political communication theory, particularly in understanding the relationship between Islamic values, political legitimacy, and identity construction in the context of a modern state.

Keywords: *Islamic Political Communication, Iran, 1979 Islamic Revolution, Wilayat al-Faqih, Resistance Symbols.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis komunikasi politik Islam di Iran dengan fokus pada karakteristiknya sebagai negara Republik Islam, peran Revolusi Islam 1979, konsep wilayat al-faqih, dan fungsi simbol perlawanan. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research dan analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik Islam di Iran dibangun melalui integrasi nilai-nilai Islam, institusi negara, ulama, media, dan masyarakat. Revolusi Islam 1979 menjadi fondasi historis pembentukan identitas politik, jaringan komunikasi keagamaan, dan budaya komunikasi berbasis Islam. Konsep wilayat al-faqih berfungsi sebagai sumber legitimasi religius-politik sekaligus pusat komunikasi ideologis yang menghubungkan negara dan masyarakat. Simbol perlawanan yang bersumber dari narasi Karbala, perjuangan Imam Husain, konsep syahid, dan pembelaan kelompok tertindas membangun identitas kolektif, opini publik, serta legitimasi politik negara. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran memadukan agama, media, ideologi, dan kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan Republik Islam Iran. Kajian ini memperkaya teori komunikasi politik Islam dalam memahami hubungan nilai Islam, legitimasi politik, dan konstruksi identitas di negara modern.

Kata Kunci: Komunikasi Politik Islam, Iran, Revolusi Islam 1979, Wilayat Al-Faqih, Simbol Perlawanan.

A. Pendahuluan

Iran merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan komunikasi politik Islam kontemporer. Pengalaman politik Iran menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi sumber legitimasi kekuasaan, mobilisasi sosial, pembentukan opini publik, serta konstruksi identitas politik nasional. Karakteristik tersebut menjadikan Iran sebagai laboratorium politik Islam modern yang memperlihatkan keterkaitan erat antara simbol keagamaan, kepemimpinan ulama, media politik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Negara ¹. Kajian komunikasi politik Islam memandang fenomena tersebut sebagai proses komunikasi yang melibatkan pertukaran makna, pembentukan legitimasi, serta pengelolaan hubungan antara negara, agama, dan masyarakat.

Perkembangan global menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap hubungan antara agama dan politik di berbagai kawasan dunia. Fenomena kebangkitan identitas keagamaan, politik simbolik, gerakan perlawanan berbasis nilai agama, serta penggunaan media digital dalam mobilisasi politik memperlihatkan bahwa agama tetap menjadi faktor penting dalam komunikasi politik abad ke-21. Kondisi tersebut terlihat pada berbagai dinamika politik Timur Tengah yang memanfaatkan narasi keagamaan sebagai instrumen legitimasi maupun resistensi terhadap dominasi politik global. Iran menjadi salah satu aktor utama yang secara konsisten memadukan ideologi Islam dengan strategi komunikasi politik dalam kebijakan domestik maupun hubungan internasionalnya².

Revolusi Islam Iran tahun 1979 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Islam modern. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan rezim monarki Mohammad Reza Shah Pahlavi dan menggantikannya dengan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Peristiwa ini menunjukkan keberhasilan komunikasi politik Islam dalam mengonsolidasikan berbagai kelompok sosial melalui penggunaan simbol-simbol keagamaan, retorika perlawanan, jaringan ulama, masjid, serta media komunikasi revolusioner. Revolusi Iran membuktikan bahwa komunikasi politik berbasis agama mampu menjadi instrumen mobilisasi massa dalam mengubah struktur politik Negara ³.

Sistem politik Iran pascarevolusi dibangun di atas konsep wilayah al-faqih atau kepemimpinan ulama. Konsep tersebut menempatkan faqih sebagai otoritas tertinggi yang

¹ Nagapushpa Devendra, "Rethinking Political Islam in Iran: Contestation, Authority, and Reform," *Middle East Policy* 33 (2026), <https://doi.org/10.1111/mepo.70103>.

² Abbas Nejati Manzari, Hamid Saeedi Javadi, and A Davoudi, "Representation of Identity in the Discourse of Neo-Modernist Political Islam After the Islamic Revolution of Iran," *Journal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History*, 2024, <https://doi.org/10.61838/kman.jspsich.3.5.7>.

³ Mhd. Latip Kahpi, Ali Syahbana Siregar, and Sahrul Romadhon, "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer," *Hikmah*, 2024, <https://doi.org/10.24952/hik.v18i1.11003>.

memiliki legitimasi religius dan politik dalam mengarahkan kehidupan negara. Keberadaan wilayah al-faqih tidak hanya menjadi fondasi konstitusional Republik Islam Iran, tetapi juga membentuk pola komunikasi politik yang khas melalui hubungan antara pemimpin agama, lembaga negara, media, dan masyarakat. Struktur tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi politik Islam dapat diinstitusionalisasikan ke dalam sistem pemerintahan modern tanpa melepaskan basis normatif keagamaan ⁴.

Fenomena politik kontemporer menunjukkan bahwa simbol perlawanan masih menjadi elemen sentral dalam komunikasi politik Iran. Narasi anti-imperialisme, solidaritas terhadap kelompok tertindas (mustadh'afin), dukungan terhadap Palestina, serta resistensi terhadap dominasi Barat terus direproduksi melalui pidato politik, media negara, lembaga pendidikan, dan diplomasi internasional. Simbol-simbol revolusi tersebut berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas kolektif sekaligus sarana mempertahankan legitimasi politik negara. Komunikasi simbolik semacam ini menunjukkan bahwa makna perlawanan tidak hanya beroperasi pada level ideologis, tetapi juga menjadi mekanisme mobilisasi opini publik dan konstruksi identitas nasional ⁵.

Transformasi digital turut mengubah lanskap komunikasi politik Iran. Media sosial menjadi arena pertarungan narasi antara negara, kelompok oposisi, dan masyarakat sipil. Ruang digital menghadirkan peluang baru dalam penyebaran ideologi politik sekaligus tantangan dalam pengelolaan opini publik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran tidak lagi berlangsung secara konvensional melalui institusi keagamaan dan media negara, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan terbentuknya ruang publik yang lebih kompleks dan dinamis ⁶.

Penelitian terdahulu telah membahas Iran dari berbagai perspektif. Sejumlah kajian telah mengkaji hubungan Islam dan politik dalam Revolusi Iran serta pembentukan Republik Islam Iran, identitas Republik Islam Iran dan ekspor revolusi sebagai instrumen politik luar negeri, kedudukan wilayah al-faqih dalam sistem pemerintahan Iran, serta dimensi filosofis dan politik konsep wilayah al-faqih dalam konteks pemerintahan Islam modern. Kajian-kajian tersebut

⁴ Goulia Ghardashkhani, Olmo Gözl, and Kevin Schwartz, "Introduction: Propagandas, Cultural Production, and Negotiating Ideology in Iran," *British Journal of Middle Eastern Studies* 51 (2024): 241–48, <https://doi.org/10.1080/13530194.2024.2342186>.

⁵ Fateh Saeidi, "“American Islam”: The Politics of Religious Authenticity in Iran," *Digest of Middle East Studies*, 2026, <https://doi.org/10.1111/dome.70030>.

⁶ M Abraar, An-Nurrahmi An-Nurrahmi, and M Syahputra, "Explaining Qur'anic Verse Selection in the State Funeral of Ayatollah Ali Khamenei through Revelatory Situation Matching," *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 2026, <https://doi.org/10.69548/jigm.v5i1.128>.

memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik Iran, tetapi masih banyak berfokus pada aspek sejarah, ideologi, dan ketatanegaraan ⁷.

Kesenjangan penelitian (research gap) terlihat pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menempatkan Iran sebagai objek analisis komunikasi politik Islam. Kajian sebelumnya belum banyak menjelaskan bagaimana Revolusi 1979 membentuk sistem komunikasi politik negara, bagaimana wilayah al-faqih berfungsi sebagai mekanisme komunikasi kekuasaan, serta bagaimana simbol perlawanan dikonstruksi dan disebarluaskan untuk membentuk opini publik. Padahal, aspek komunikasi menjadi faktor penting yang menjelaskan keberlangsungan legitimasi politik dan pengaruh ideologis Iran dalam politik regional maupun global.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami model komunikasi politik Islam yang berkembang di Iran sebagai salah satu representasi penting dalam politik Islam kontemporer. Pemahaman tersebut penting untuk memperkaya khazanah ilmu komunikasi politik Islam, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara agama, media, opini publik, dan kekuasaan. Perspektif ini menempatkan komunikasi politik Islam sebagai proses interaksi antara aktor politik, media, opini publik, dan nilai-nilai Islam dalam membangun legitimasi politik. Komunikasi politik Islam juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas politik, mobilisasi masyarakat, penguatan ideologi, dan pengelolaan hubungan antara negara serta warga negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam ⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis karakteristik komunikasi politik Islam di Iran sebagai negara Republik Islam; (2) mengkaji peran Revolusi Islam 1979 dalam pembentukan komunikasi politik Iran kontemporer; (3) menganalisis konsep wilayah al-faqih sebagai fondasi komunikasi politik dan legitimasi kekuasaan; serta (4) menjelaskan fungsi simbol perlawanan sebagai instrumen komunikasi politik Islam dalam membangun identitas, opini publik, dan legitimasi politik Negara ⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada kajian komunikasi politik Islam di Iran, Revolusi Islam 1979, *wilayat al-faqih*, dan simbol perlawanan melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi buku-buku utama yang berkaitan dengan komunikasi politik Islam, politik Iran, Revolusi Islam

⁷ Najahan Musyafak et al., "Rhetoric, Identity, and Hegemony: Constructing Khamenei's Counter-Hegemonic Discourse in the 2025 Iran-Israel War," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2026, <https://doi.org/10.15575/cjik.v10i1.54897>.

⁸ Bahram Kazemian, S Qaiwer, and Shafiqeh Mohammadian, "Islamification vs. Islamophobia: A Message to the Youth in the Occident: Critical & Rhetorical Inquiries," *Journal of Language Teaching and Research*, 2021, <https://doi.org/10.17507/jltr.1205.19>.

⁹ Sabah Mofidi, "The Political Function of Religion in Kurdish and Perso-Iranian Nationalist Confrontations after the 1979 Revolution," *International Journal on Minority and Group Rights*, 2022, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10080>.

1979, dan konsep *wilayat al-faqih*. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan komunikasi politik Islam dan politik Iran.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang diperoleh dari Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan sumber akademik lainnya. Literatur yang dipilih disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian serta mempertimbangkan relevansi informasi terhadap permasalahan yang dikaji. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Data direduksi, dikategorikan berdasarkan tema penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi politik Islam di Iran. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk membangun konstruksi konseptual yang menjelaskan hubungan antara Revolusi Islam 1979, *wilayat al-faqih*, dan simbol perlawanan dalam komunikasi politik Republik Islam Iran.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan karakteristik komunikasi politik Islam di Iran serta relevansinya bagi pengembangan kajian komunikasi politik Islam kontemporer.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Komunikasi Politik Islam di Iran sebagai Negara Republik Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran memiliki karakteristik yang khas karena dibangun di atas integrasi antara agama, negara, dan masyarakat dalam satu sistem politik yang disebut Republik Islam. Berbeda dengan negara-negara sekuler yang memisahkan agama dari proses politik formal, Iran menjadikan Islam sebagai fondasi ideologis, normatif, dan institusional dalam seluruh aktivitas politik negara. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian kebijakan publik, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai Islam, pembentukan legitimasi kekuasaan, serta pemeliharaan identitas politik nasional. Komunikasi politik di Iran berlangsung melalui hubungan yang saling terintegrasi antara ulama, lembaga negara, media, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam kerangka ideologi Republik Islam yang berlandaskan ajaran Syiah Imamiyah¹⁰.

Karakteristik pertama terlihat pada dominasi nilai-nilai Islam sebagai landasan normatif komunikasi politik. Seluruh proses komunikasi politik di Iran dibangun di atas

¹⁰ Afsaneh Tavassoli and L Teo, "Islamic Feminist Political Narratives, Reformist Islamic Thought, and Its Discursive Challenges in Contemporary Iran," *Inter-Asia Cultural Studies* 22 (2021): 49–66, <https://doi.org/10.1080/14649373.2021.1886481>.

prinsip-prinsip Islam yang dipandang sebagai sumber etika dan legitimasi kekuasaan. Nilai keadilan ('adalah), amanah, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap kaum tertindas (mustadh'afin), dan perlawanan terhadap kezaliman menjadi narasi utama yang terus direproduksi dalam berbagai bentuk komunikasi politik. Pesan-pesan yang disampaikan pemerintah, pemimpin agama, maupun elite politik tidak hanya menjelaskan kebijakan negara, tetapi juga berupaya menghubungkan kebijakan tersebut dengan ajaran Islam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai sarana konstruksi makna yang menghubungkan kepentingan politik dengan kewajiban moral dan religius masyarakat ¹¹.

Dominasi nilai Islam tersebut mencerminkan konsep komunikasi politik Islam yang menempatkan pesan politik sebagai bagian dari dakwah sosial dan pendidikan politik masyarakat. Politik tidak dipahami sekadar sebagai arena kompetisi kekuasaan, melainkan sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan publik. Setiap kebijakan negara berusaha memperoleh legitimasi melalui argumentasi religius yang menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Situasi tersebut menghasilkan model komunikasi politik yang tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga normatif dan edukatif karena bertujuan membentuk kesadaran politik masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama.

Karakteristik kedua adalah sentralitas ulama sebagai aktor utama komunikasi politik. Dalam sistem Republik Islam Iran, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai komunikator politik yang memiliki otoritas tinggi dalam membentuk opini publik dan arah politik negara. Posisi ulama memperoleh legitimasi karena dipandang memiliki kapasitas keilmuan dan moral untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sosial-politik. Hubungan antara ulama dan masyarakat tidak dibangun semata-mata melalui mekanisme birokrasi negara, tetapi juga melalui ikatan religius yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Iran.

Peran strategis ulama terlihat melalui keberadaan jaringan komunikasi yang luas dan terorganisasi. Masjid, hauzah ilmiah (seminari Islam), lembaga pendidikan, organisasi sosial-keagamaan, dan forum keagamaan berfungsi sebagai saluran komunikasi politik yang efektif. Jaringan tersebut memungkinkan pesan politik negara disampaikan secara langsung kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pembentukan konsensus sosial. Keberadaan saluran komunikasi berbasis agama ini menjadikan komunikasi politik Iran memiliki tingkat penetrasi sosial yang tinggi karena

¹¹ A Jong and Saman Ebrahimzadeh, "Ahmad Moftizadeh and the Idea of the Islamic Government: A Discursive Tradition Analysis in the Field of Political Islam," *Religions*, 2024, <https://doi.org/10.3390/rel15020220>.

berlangsung melalui institusi yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat selama berabad-abad. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi komunikasi politik tidak hanya berasal dari kekuatan negara, tetapi juga dari otoritas simbolik dan moral yang dimiliki para ulama ¹².

Karakteristik ketiga berkaitan dengan integrasi antara institusi negara dan institusi keagamaan dalam proses komunikasi politik. Hubungan antara agama dan negara di Iran bersifat struktural sehingga komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemerintahan. Lembaga-lembaga negara seperti Kantor Pemimpin Tertinggi, Dewan Garda, parlemen, kementerian, dan lembaga penyiaran nasional berfungsi sebagai instrumen komunikasi yang menyebarkan nilai-nilai Revolusi Islam dan ideologi negara kepada masyarakat. Integrasi tersebut menghasilkan pola komunikasi politik yang bersifat terpusat, konsisten, dan berkelanjutan dalam mempertahankan legitimasi politik negara.

Karakteristik keempat terlihat pada penggunaan media sebagai instrumen reproduksi ideologi dan pembentukan identitas politik. Media massa di Iran tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai perangkat ideologis yang berperan dalam mempertahankan nilai-nilai Revolusi Islam. Melalui televisi nasional, radio, surat kabar, portal berita, film, dan media digital, negara secara aktif membangun narasi mengenai identitas Republik Islam, pentingnya persatuan nasional, serta peran Iran dalam memperjuangkan keadilan global. Media menjadi arena produksi makna yang menghubungkan ideologi negara dengan pengalaman sehari-hari masyarakat sehingga menciptakan legitimasi simbolik yang berkelanjutan ¹³.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang komunikasi politik di Iran. Media sosial menjadi arena baru bagi interaksi antara negara dan masyarakat, sekaligus menjadi ruang kontestasi berbagai narasi politik. Pemerintah Iran memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan ideologis, memperkuat dukungan publik, serta membangun citra negara di tingkat internasional. Kehadiran media digital menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan fondasi ideologis yang dibangun sejak Revolusi Islam 1979. Adaptasi tersebut memperlihatkan kemampuan sistem komunikasi politik Iran

¹² Arash Beidollahkhani and Mahboobeh Farkhari, "Femininity Opposition and Revolution in the Islamic Republic of Iran; an Analysis from Twitter," *Feminist Media Studies* 25 (2024): 1938–58, <https://doi.org/10.1080/14680777.2024.2394840>.

¹³ Arash Beidollahkhani, "Discourse Formation of Political Dissents via Twitter: Political Sociology of the Subversion Discourse in the Islamic Republic of Iran," *Sociological Research Online* 27 (2022): 1020–39, <https://doi.org/10.1177/13607804221122462>.

dalam mengombinasikan instrumen komunikasi tradisional berbasis agama dengan teknologi komunikasi modern ¹⁴.

Karakteristik kelima adalah kuatnya orientasi ideologis dalam pembentukan opini publik. Komunikasi politik Iran tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai kebijakan negara, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu domestik dan internasional. Narasi tentang kemandirian nasional, anti-imperialisme, solidaritas terhadap kelompok tertindas, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam terus diproduksi melalui berbagai saluran komunikasi. Opini publik dibentuk melalui proses komunikasi yang menghubungkan pengalaman historis Revolusi Islam, ajaran agama, dan kepentingan nasional sehingga menghasilkan identitas politik yang relatif kuat di tengah masyarakat Iran.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran memiliki karakteristik utama berupa dominasi nilai-nilai Islam, sentralitas ulama sebagai komunikator politik, integrasi agama dan negara, penggunaan media sebagai instrumen ideologis, serta orientasi pada pembentukan opini publik yang berbasis identitas keagamaan dan nasional. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik Iran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian pesan politik, tetapi juga sebagai instrumen reproduksi ideologi, pembentukan identitas kolektif, serta pemeliharaan legitimasi kekuasaan ¹⁵.

2. Peran Revolusi Islam 1979 dalam Pembentukan Komunikasi Politik Iran Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan peristiwa historis yang memiliki pengaruh fundamental terhadap pembentukan sistem komunikasi politik Iran kontemporer. Revolusi tersebut tidak hanya mengubah struktur kekuasaan dari monarki sekuler di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam yang dipimpin ulama, tetapi juga mentransformasi paradigma komunikasi politik dari model yang berorientasi pada legitimasi negara modern sekuler menjadi model komunikasi politik berbasis nilai-nilai Islam. Revolusi menjadi titik awal lahirnya sistem komunikasi politik yang mengintegrasikan agama, ideologi, media, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka politik yang saling berkaitan. Pengaruh revolusi tersebut masih menjadi fondasi utama dalam berbagai praktik komunikasi politik Iran hingga saat ini.

¹⁴ Gholam Khiabany, "Iranian Media: The Paradox of Modernity," *Social Semiotics* 17 (2007): 479–501, <https://doi.org/10.1080/10350330701637064>.

¹⁵ Al Mukarromah, "Dakwah Dalam Pandangan Imam Khomeini (1902-1989 M)," *Al-Qaul: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2022, <https://doi.org/10.33511/alqaul.v1n1.1-29>.

Peran pertama Revolusi Islam 1979 terlihat pada pembentukan identitas politik nasional yang menjadi dasar komunikasi politik negara. Sebelum revolusi, identitas politik Iran lebih banyak dibangun melalui narasi nasionalisme modern dan modernisasi ala Barat yang dikembangkan oleh rezim Pahlavi. Revolusi mengubah orientasi tersebut dengan menempatkan Islam sebagai sumber utama identitas politik negara. Identitas baru tersebut dibangun melalui narasi perjuangan melawan penindasan, kemandirian nasional, keadilan sosial, serta pembelaan terhadap kelompok tertindas. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi bagian integral dari pesan-pesan politik yang disampaikan negara kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal ¹⁶.

Pembentukan identitas politik pascarevolusi dilakukan melalui proses komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan. Pidato pemimpin negara, kurikulum pendidikan, media massa, peringatan revolusi, serta berbagai simbol kenegaraan digunakan untuk memperkuat memori kolektif masyarakat mengenai pentingnya Revolusi Islam dalam sejarah bangsa Iran. Narasi revolusi tidak hanya diposisikan sebagai peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi politik yang terus relevan dalam menghadapi tantangan domestik dan global. Proses tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran berfungsi sebagai mekanisme reproduksi identitas nasional yang berakar pada pengalaman revolusioner dan nilai-nilai Islam ¹⁷.

Peran kedua revolusi berkaitan dengan institusionalisasi jaringan komunikasi politik berbasis agama. Salah satu kekuatan utama Revolusi Islam 1979 terletak pada kemampuan ulama memanfaatkan jaringan keagamaan sebagai sarana mobilisasi politik. Masjid, hauzah ilmiah, majelis taklim, organisasi sosial Islam, dan berbagai forum keagamaan berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif dalam menyebarkan ideologi revolusi kepada masyarakat. Jaringan tersebut terbukti mampu menghubungkan elite agama dengan masyarakat akar rumput sehingga pesan politik dapat diterima secara luas dan cepat.

Pascarevolusi, jaringan komunikasi berbasis agama tersebut tidak dibubarkan, tetapi justru dilembagakan sebagai bagian dari sistem komunikasi politik negara. Masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi ruang komunikasi sosial dan politik. Khutbah Jumat, ceramah keagamaan, dan kegiatan keislaman lainnya berfungsi sebagai saluran komunikasi yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan

¹⁶ "Media Misrepresentation Predisposing Iranian Social Divide," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 2022, <https://doi.org/10.7454/meis.v9i1.141>.

¹⁷ H Kermani and Marzieh Adham, "Mapping Persian Twitter: Networks and Mechanism of Political Communication in Iranian 2017 Presidential Election," *Big Data & Society* 8 (2021), <https://doi.org/10.1177/20539517211025568>.

masyarakat. Institusionalisasi jaringan tersebut menciptakan model komunikasi politik yang memiliki tingkat penetrasi sosial tinggi karena memanfaatkan institusi yang telah memperoleh legitimasi budaya dan religius di tengah masyarakat Iran. Kondisi ini menunjukkan bahwa Revolusi Islam berhasil mentransformasikan institusi keagamaan menjadi instrumen komunikasi politik yang efektif dalam mempertahankan stabilitas politik negara.

Peran ketiga terlihat pada pembentukan budaya komunikasi politik yang berorientasi pada simbol dan narasi keagamaan. Revolusi Islam tidak hanya menghasilkan perubahan struktural dalam pemerintahan, tetapi juga menciptakan budaya politik baru yang menjadikan simbol-simbol Islam sebagai bagian penting dalam komunikasi publik. Narasi Karbala, perjuangan Imam Husain, konsep syahid, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap kezaliman menjadi simbol utama yang digunakan dalam berbagai pesan politik negara. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang mampu menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas politik kontemporer sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya resonansi yang kuat di kalangan masyarakat ¹⁸.

Budaya komunikasi politik yang terbentuk pascarevolusi menunjukkan bahwa legitimasi politik di Iran tidak hanya dibangun melalui prosedur hukum dan institusi formal, tetapi juga melalui konstruksi simbolik yang berakar pada tradisi keagamaan masyarakat. Penggunaan simbol keagamaan memungkinkan negara membangun ikatan emosional antara masyarakat dan ideologi politik yang dianut. Situasi tersebut menjelaskan mengapa komunikasi politik Iran memiliki dimensi afektif yang kuat karena tidak hanya menyentuh aspek rasional masyarakat, tetapi juga aspek spiritual dan identitas kolektif mereka.

Peran keempat revolusi terlihat pada pembentukan model legitimasi komunikasi politik yang berbasis pada memori historis revolusi. Revolusi 1979 terus direpresentasikan sebagai simbol kemenangan rakyat melawan tirani, dominasi asing, dan ketidakadilan sosial. Representasi tersebut menjadi sumber legitimasi yang terus direproduksi dalam komunikasi politik negara. Setiap kebijakan strategis, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional, sering dikaitkan dengan semangat dan nilai-nilai revolusi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa revolusi tidak

¹⁸ Hülya Özkan Rıgıderakhshan, "TÜRKİYE'DE İSLAMİ GRUPLARIN İRAN İSLAM DEVRİMİ'NE YAKLAŞIMI VE DEVRİM İHRACI MESELESİ: DERGİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME," *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)*, 2022, <https://doi.org/10.46442/intjcss.1082907>.

hanya menjadi peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi sumber narasi yang terus digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan negara.

Peran kelima berkaitan dengan transformasi komunikasi politik Iran dalam menghadapi era digital. Meskipun Revolusi Islam lahir pada era komunikasi konvensional yang bertumpu pada masjid, pidato publik, dan media cetak, nilai-nilai revolusi tetap menjadi fondasi utama dalam komunikasi politik digital Iran. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan aktor politik memanfaatkan media sosial serta platform digital untuk menyebarkan narasi revolusi kepada generasi muda. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa Revolusi Islam tidak hanya membentuk struktur komunikasi politik pada masa lalu, tetapi juga memengaruhi strategi komunikasi politik Iran dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer.

Perspektif komunikasi politik Islam menjelaskan bahwa Revolusi Islam 1979 telah menciptakan hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam, media komunikasi, aktor politik, dan opini publik. Revolusi Iran menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuan membangun identitas kolektif, memobilisasi masyarakat, dan menciptakan makna bersama yang diterima sebagai bagian dari kesadaran sosial masyarakat.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa Revolusi Islam 1979 berperan sebagai fondasi historis, ideologis, dan komunikatif dalam sistem politik Iran kontemporer. Revolusi membentuk identitas politik negara, melembagakan jaringan komunikasi berbasis agama, menciptakan budaya komunikasi yang sarat simbol keagamaan, membangun legitimasi politik melalui memori kolektif revolusi, serta menjadi dasar adaptasi komunikasi politik Iran dalam era digital. Keseluruhan proses tersebut menjadikan Revolusi Islam 1979 tidak hanya sebagai peristiwa perubahan politik, tetapi juga sebagai fondasi utama pembentukan model komunikasi politik Islam yang terus bertahan dan berkembang dalam kehidupan politik Republik Islam Iran hingga saat ini.

3. Konsep Wilayah al-Faqih sebagai Fondasi Komunikasi Politik dan Legitimasi Kekuasaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah al-faqih merupakan fondasi utama yang membedakan sistem komunikasi politik Republik Islam Iran dari sistem politik modern lainnya. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai doktrin politik dan konstitusional, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang mengatur hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Dalam perspektif politik Islam Syiah, wilayah al-faqih menempatkan faqih atau ulama yang memenuhi syarat keilmuan, moralitas, dan kapasitas kepemimpinan sebagai pemegang otoritas tertinggi negara pada masa kegaiban Imam

Mahdi. Posisi tersebut menjadikan legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari konstitusi dan mekanisme politik formal, tetapi juga berasal dari otoritas keagamaan yang diyakini memiliki dasar teologis dan moral yang kuat.

Konsep wilayah al-faqih lahir dari pemikiran Ayatollah Ruhollah Khomeini yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan Islam ke dalam sistem negara modern. Khomeini berpandangan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip pemerintahan yang harus diwujudkan dalam kehidupan politik. Perspektif tersebut melahirkan gagasan bahwa kepemimpinan negara harus berada di bawah pengawasan dan otoritas faqih agar seluruh kebijakan publik tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini kemudian menjadi dasar pembentukan Republik Islam Iran setelah Revolusi 1979 dan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Iran.

Fungsi pertama wilayah al-faqih terlihat sebagai sumber utama legitimasi politik negara. Dalam sistem Republik Islam Iran, legitimasi tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum, institusi pemerintahan, atau aturan hukum, tetapi juga melalui pengakuan terhadap otoritas religius faqih. Kepemimpinan faqih dipandang sebagai representasi penjaga syariat dan pelindung kepentingan umat sehingga keberadaannya memiliki dimensi spiritual sekaligus politik. Kondisi ini menciptakan bentuk legitimasi ganda, yaitu legitimasi konstitusional dan legitimasi religius. Kombinasi keduanya menghasilkan penerimaan politik karena kebijakan negara tidak hanya dipahami sebagai keputusan politik, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Legitimasi religius tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pola komunikasi politik negara. Pesan-pesan politik yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi memperoleh bobot simbolik yang lebih besar dibandingkan komunikasi politik biasa karena masyarakat memandangnya sebagai representasi otoritas agama. Komunikasi politik tidak hanya diterima sebagai informasi atau arahan politik, tetapi juga sebagai pedoman moral yang memiliki dimensi spiritual. Situasi tersebut memperkuat fungsi komunikasi politik dalam membangun kepatuhan sosial dan dukungan terhadap kebijakan negara.

Fungsi kedua berkaitan dengan pengelolaan komunikasi politik nasional. Dalam sistem wilayah al-faqih, Pemimpin Tertinggi (Rahbar) berperan sebagai pusat komunikasi politik yang menghubungkan ideologi negara, institusi pemerintahan, dan masyarakat. Posisi tersebut menjadikan Rahbar tidak hanya sebagai pengambil keputusan strategis, tetapi juga sebagai komunikator utama yang mengarahkan narasi politik nasional. Pidato resmi, khutbah keagamaan, fatwa, pesan kenegaraan, dan berbagai pernyataan publik

menjadi instrumen komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan arah kebijakan negara serta membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu politik.

Peran komunikasi Rahbar sangat terlihat dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan hubungan internasional, keamanan nasional, ekonomi, dan identitas politik negara. Pernyataan yang disampaikan oleh Pemimpin Tertinggi sering menjadi rujukan utama bagi lembaga negara, media massa, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Proses tersebut menciptakan pola komunikasi politik yang terpusat sehingga memungkinkan terbentuknya konsistensi narasi antara negara dan berbagai institusi sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa wilayah al-faqih tidak hanya berfungsi sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi komunikasi politik nasional yang menjaga kesatuan arah ideologis negara.

Fungsi ketiga terlihat pada kemampuannya membangun konsensus sosial dan integrasi politik. Keberadaan faqih sebagai otoritas tertinggi memungkinkan terciptanya titik temu antara kepentingan politik negara dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Konsensus tersebut dibangun melalui proses komunikasi yang menghubungkan ajaran Islam dengan tujuan-tujuan politik nasional. Narasi mengenai keadilan sosial, kemerdekaan nasional, perlindungan terhadap kelompok tertindas, dan perlawanan terhadap dominasi asing disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi sehingga membentuk pemahaman bersama mengenai arah dan tujuan negara.

Kemampuan membangun konsensus sosial menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik Iran. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas ideologis yang memiliki tujuan bersama. Kesamaan identitas tersebut memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi fragmentasi politik yang dapat mengancam stabilitas negara. Perspektif ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam kerangka wilayah al-faqih berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang menghubungkan negara dan masyarakat melalui nilai-nilai bersama yang bersumber dari agama.

Fungsi keempat berkaitan dengan pembentukan dan reproduksi ideologi negara. Konsep wilayah al-faqih memungkinkan negara memiliki sumber otoritas ideologis yang jelas dalam menjelaskan berbagai kebijakan publik. Ideologi Republik Islam tidak hanya diproduksi melalui institusi politik formal, tetapi juga disebarluaskan melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media massa, dan berbagai aktivitas sosial. Proses komunikasi tersebut memungkinkan nilai-nilai Revolusi Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Reproduksi ideologi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem politik Iran di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi.

Perkembangan media digital menunjukkan bahwa konsep wilayah al-faqih tetap memiliki relevansi dalam era komunikasi kontemporer. Pesan-pesan Pemimpin Tertinggi tidak lagi hanya disampaikan melalui media konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan jangkauan komunikasi lebih luas dan cepat. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa sistem komunikasi politik Iran mampu memanfaatkan teknologi modern untuk mempertahankan fungsi ideologis dan legitimatif dari wilayah al-faqih. Teknologi komunikasi digunakan sebagai sarana memperluas pengaruh pesan politik tanpa mengubah substansi nilai-nilai yang menjadi dasar sistem politik negara.

Perspektif komunikasi politik Islam menjelaskan bahwa wilayah al-faqih merupakan bentuk institusionalisasi hubungan antara nilai agama, kekuasaan politik, media, dan opini publik. Konsep ini memperlihatkan bagaimana otoritas religius dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus pusat komunikasi politik dalam sebuah negara modern. Komunikasi politik Islam dibangun melalui interaksi antara nilai-nilai Islam, aktor politik, media, dan masyarakat dalam proses pembentukan legitimasi politik. Komunikasi politik Islam juga berfungsi sebagai instrumen penguatan identitas, mobilisasi sosial, dan pengelolaan hubungan antara negara dan warga negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa wilayah al-faqih tidak hanya merupakan konsep ketatanegaraan, tetapi juga merupakan fondasi komunikasi politik Republik Islam Iran. Konsep ini berfungsi sebagai sumber legitimasi politik, pusat pengelolaan komunikasi nasional, instrumen pembentukan konsensus sosial, dan mekanisme reproduksi ideologi negara. Keberadaan wilayah al-faqih menjadikan komunikasi politik Iran memiliki karakter religius, ideologis, dan integratif yang memungkinkan negara mempertahankan legitimasi serta stabilitas politik. Struktur tersebut memperlihatkan bagaimana agama, kekuasaan, media, dan opini publik saling berinteraksi dalam membentuk sistem komunikasi politik Islam yang khas dan berkelanjutan.

4. Simbol Perlawanan sebagai Instrumen Komunikasi Politik Islam dalam Membangun Identitas, Opini Publik, dan Legitimasi Politik

Hasil kajian menunjukkan bahwa simbol perlawanan (*resistance symbols*) merupakan elemen sentral dalam sistem komunikasi politik Republik Islam Iran. Simbol tersebut berfungsi sebagai perangkat komunikasi ideologis yang menghubungkan pengalaman historis, nilai-nilai keagamaan, memori kolektif revolusi, serta kepentingan politik negara. Dalam konteks Iran, perlawanan tidak hanya dipahami sebagai tindakan

politik terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai identitas ideologis yang membentuk cara negara dan masyarakat memaknai hubungan antara kekuasaan, keadilan, dan agama. Narasi perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan, kolonialisme, dan dominasi asing menjadi bagian penting dari komunikasi politik yang terus direproduksi sejak Revolusi Islam 1979 hingga saat ini.

Simbol perlawanan memperoleh kekuatan komunikatif karena berakar pada tradisi keagamaan Syiah yang memiliki sejarah panjang mengenai perjuangan melawan tirani dan ketidakadilan. Peristiwa Karbala yang menampilkan perjuangan Imam Husain melawan kekuasaan Yazid menjadi sumber simbolik utama dalam konstruksi komunikasi politik Iran. Peristiwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai tragedi sejarah keagamaan, tetapi juga ditafsirkan sebagai representasi universal tentang perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, keadilan dan penindasan, serta keberanian melawan kekuasaan yang dianggap zalim. Interpretasi tersebut memungkinkan simbol Karbala digunakan secara efektif dalam berbagai konteks politik kontemporer sehingga menjadi fondasi ideologis komunikasi politik Republik Islam Iran.

Fungsi pertama simbol perlawanan adalah membangun identitas kolektif masyarakat dan negara. Identitas politik Iran pascarevolusi dibentuk melalui proses komunikasi yang menghubungkan sejarah Islam Syiah, pengalaman Revolusi 1979, dan narasi perjuangan melawan dominasi asing. Simbol-simbol seperti Karbala, Imam Husain, syahid, dan mustadh'afin digunakan untuk membangun kesadaran bersama mengenai siapa masyarakat Iran, apa nilai-nilai yang mereka perjuangkan, dan bagaimana posisi mereka dalam tatanan politik global. Identitas tersebut tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga ideologis karena menempatkan Iran sebagai representasi perjuangan keadilan dan pembelaan terhadap kelompok tertindas.

Pembentukan identitas kolektif berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pendidikan, media massa, peringatan keagamaan, pidato politik, dan ritual sosial. Peringatan Asyura, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai media komunikasi politik yang mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Pengulangan simbol-simbol tersebut dalam kehidupan publik menciptakan memori kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan serta loyalitas terhadap ideologi negara. Proses ini menunjukkan bahwa simbol perlawanan memiliki fungsi integratif dalam membangun identitas nasional yang berakar pada agama dan sejarah politik.

Fungsi kedua berkaitan dengan pembentukan opini publik. Simbol perlawanan digunakan sebagai kerangka interpretatif (*interpretive frame*) yang membantu masyarakat

memahami berbagai isu politik domestik maupun internasional. Media massa, pidato para pemimpin politik, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan secara konsisten mereproduksi narasi mengenai perlawanan terhadap ketidakadilan, dominasi asing, dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Proses komunikasi tersebut membentuk persepsi masyarakat mengenai posisi Iran dalam percaturan global serta memperkuat keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan independensi politik dan nilai-nilai Islam.

Penggunaan simbol perlawanan dalam pembentukan opini publik menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada konstruksi makna. Berbagai isu seperti sanksi ekonomi, konflik regional, hubungan dengan Amerika Serikat, dukungan terhadap Palestina, dan kebijakan luar negeri lainnya sering dikomunikasikan melalui narasi perlawanan. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat menafsirkan berbagai kebijakan negara dalam kerangka moral dan ideologis yang telah mereka pahami sebelumnya. Simbol perlawanan berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan makna yang membantu membangun kesamaan persepsi di tengah kompleksitas isu politik yang berkembang.

Fungsi ketiga adalah memperkuat legitimasi politik negara. Dalam sistem Republik Islam Iran, legitimasi tidak hanya dibangun melalui konstitusi, institusi pemerintahan, atau mekanisme pemilu, tetapi juga melalui konstruksi simbolik yang menghubungkan negara dengan nilai-nilai revolusi dan ajaran Islam. Simbol perlawanan digunakan untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar dalam mempertahankan keadilan, kemerdekaan, dan martabat bangsa. Hubungan tersebut menciptakan justifikasi moral terhadap berbagai keputusan politik yang diambil negara sehingga memperoleh penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Legitimasi simbolik menjadi penting karena mampu menghubungkan kepentingan negara dengan keyakinan religius masyarakat. Ketika suatu kebijakan dikaitkan dengan semangat Karbala, perjuangan syuhada revolusi, atau pembelaan terhadap kelompok tertindas, kebijakan tersebut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keputusan politik, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam. Situasi ini memperlihatkan bahwa simbol perlawanan berfungsi sebagai jembatan antara legitimasi religius dan legitimasi politik sehingga memperkuat stabilitas sistem Republik Islam Iran.

Fungsi keempat terlihat pada kemampuannya membangun solidaritas transnasional. Simbol perlawanan tidak hanya digunakan untuk kepentingan domestik, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi politik Iran dalam membangun pengaruh di tingkat regional dan internasional. Narasi pembelaan terhadap Palestina, dukungan terhadap

kelompok tertindas, dan penolakan terhadap dominasi kekuatan besar digunakan untuk membangun hubungan emosional dan ideologis dengan berbagai komunitas Muslim di luar Iran. Strategi tersebut menunjukkan bahwa simbol perlawanan memiliki dimensi diplomatik karena mampu memperluas jangkauan pengaruh ideologi Republik Islam Iran di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam secara lebih luas.

Perkembangan media digital semakin memperkuat fungsi simbol perlawanan dalam komunikasi politik Iran. Media sosial, platform video, portal berita daring, dan berbagai saluran komunikasi digital memungkinkan simbol-simbol tersebut disebarluaskan kepada audiens yang lebih luas. Negara memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk mereproduksi narasi revolusi, perjuangan syuhada, dan perlawanan terhadap dominasi asing dalam bentuk yang lebih adaptif dan mudah diterima generasi muda. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa simbol perlawanan memiliki fleksibilitas tinggi sehingga tetap relevan dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi global.

Perspektif komunikasi politik Islam menjelaskan bahwa simbol perlawanan merupakan instrumen penting yang menghubungkan nilai-nilai Islam, media, opini publik, dan kekuasaan dalam satu proses komunikasi yang berkelanjutan. Simbol tidak hanya berfungsi sebagai alat retorika politik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas, mobilisasi sosial, dan penguatan legitimasi. Komunikasi politik Islam dibangun melalui interaksi antara nilai-nilai Islam, media, aktor politik, dan opini publik dalam membentuk legitimasi politik. Simbol dan narasi politik juga memiliki peran penting dalam membangun identitas kolektif serta memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat dalam sistem politik Islam.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa simbol perlawanan memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik Republik Islam Iran. Simbol tersebut berfungsi membangun identitas kolektif, membentuk opini publik, memperkuat legitimasi politik, serta memperluas pengaruh ideologis negara pada tingkat regional dan global. Narasi Karbala, perjuangan Imam Husain, konsep syahid, dan pembelaan terhadap kelompok tertindas menjadi perangkat komunikasi yang memungkinkan negara menghubungkan pengalaman historis, nilai-nilai agama, dan kepentingan politik dalam satu konstruksi makna yang diterima masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan simbol perlawanan sebagai salah satu pilar utama komunikasi politik Islam di Iran yang berkontribusi terhadap keberlanjutan legitimasi dan stabilitas politik Republik Islam hingga era kontemporer.

C. Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran dibangun melalui integrasi antara agama, negara, media, dan masyarakat dalam kerangka Republik Islam. Karakteristik utamanya terlihat pada dominasi nilai-nilai Islam, peran sentral ulama sebagai aktor komunikasi politik, serta penggunaan media sebagai sarana penyebaran ideologi dan pembentukan opini publik. Revolusi Islam 1979 menjadi fondasi historis yang membentuk identitas politik, jaringan komunikasi keagamaan, dan budaya komunikasi politik Iran kontemporer. Konsep wilayah al-faqih berfungsi sebagai sumber legitimasi religius dan politik sekaligus pusat komunikasi ideologis negara. Simbol perlawanan berperan penting dalam membangun identitas kolektif, membentuk opini publik, dan memperkuat legitimasi politik melalui narasi keadilan, perjuangan, dan perlawanan terhadap penindasan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Islam di Iran merupakan sistem komunikasi yang memadukan nilai Islam, kekuasaan, media, dan simbol politik dalam menjaga legitimasi serta stabilitas Negara. Penelitian ini menggunakan metode library research sehingga temuan didasarkan pada analisis literatur tanpa data lapangan. Kajian juga terbatas pada aspek komunikasi politik Islam, Revolusi 1979, wilayah al-faqih, dan simbol perlawanan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji komunikasi politik digital, media sosial, serta dinamika opini publik Iran secara lebih empiris dan mendalam.

Referensi

- Abraar, M, An-Nurrahmi An-Nurrahmi, and M Syahputra. "Explaining Qur'anic Verse Selection in the State Funeral of Ayatollah Ali Khamenei through Revelatory Situation Matching." *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 2026. <https://doi.org/10.69548/jigm.v5i1.128>.
- Beidollahkhani, Arash. "Discourse Formation of Political Dissents via Twitter: Political Sociology of the Subversion Discourse in the Islamic Republic of Iran." *Sociological Research Online* 27 (2022): 1020–39. <https://doi.org/10.1177/13607804221122462>.
- Beidollahkhani, Arash, and Mahboobeh Farkhari. "Femininity Opposition and Revolution in the Islamic Republic of Iran; an Analysis from Twitter." *Feminist Media Studies* 25 (2024): 1938–58. <https://doi.org/10.1080/14680777.2024.2394840>.
- Devendra, Nagapushpa. "Rethinking Political Islam in Iran: Contestation, Authority, and Reform." *Middle East Policy* 33 (2026). <https://doi.org/10.1111/mepo.70103>.
- Ghardashkhani, Goulia, Olmo Gözl, and Kevin Schwartz. "Introduction: Propagandas, Cultural Production, and Negotiating Ideology in Iran." *British Journal of Middle Eastern Studies* 51 (2024): 241–48. <https://doi.org/10.1080/13530194.2024.2342186>.
- Jong, A, and Saman Ebrahimzadeh. "Ahmad Moftizadeh and the Idea of the Islamic Government: A Discursive Tradition Analysis in the Field of Political Islam." *Religions*, 2024. <https://doi.org/10.3390/rel15020220>.
- Kahpi, Mhd. Latip, Ali Syahbana Siregar, and Sahrul Romadhon. "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi, Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer." *Hikmah*, 2024. <https://doi.org/10.24952/hik.v18i1.11003>.
- Kazemian, Bahram, S Qaiwer, and Shafigh Mohamadian. "Islamification vs. Islamophobia: A Message to the Youth in the Occident: Critical & Rhetorical Inquiries." *Journal of Language Teaching and Research*, 2021. <https://doi.org/10.17507/jltr.1205.19>.

- Kermani, H, and Marzieh Adham. "Mapping Persian Twitter: Networks and Mechanism of Political Communication in Iranian 2017 Presidential Election." *Big Data & Society* 8 (2021). <https://doi.org/10.1177/20539517211025568>.
- Khiabany, Gholam. "Iranian Media: The Paradox of Modernity." *Social Semiotics* 17 (2007): 479–501. <https://doi.org/10.1080/10350330701637064>.
- Manzari, Abbas Nejati, Hamid Saeedi Javadi, and A Davoudi. "Representation of Identity in the Discourse of Neo-Modernist Political Islam After the Islamic Revolution of Iran." *Journal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History*, 2024. <https://doi.org/10.61838/kman.jpsich.3.5.7>.
- "Media Misrepresentation Predisposing Iranian Social Divide." *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 2022. <https://doi.org/10.7454/meis.v9i1.141>.
- Mofidi, Sabah. "The Political Function of Religion in Kurdish and Perso-Iranian Nationalist Confrontations after the 1979 Revolution." *International Journal on Minority and Group Rights*, 2022. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10080>.
- Mukarromah, Al. "Dakwah Dalam Pandangan Imam Khomeini (1902-1989 M)." *Al-Qaul: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2022. <https://doi.org/10.33511/alqaul.v1n1.1-29>.
- Musyafak, Najahan, Abdul Karim, Wildan Azkal Fikri, and Citra Orwela. "Rhetoric, Identity, and Hegemony: Constructing Khamenei's Counter-Hegemonic Discourse in the 2025 Iran-Israel War." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2026. <https://doi.org/10.15575/cjik.v10i1.54897>.
- Rıgıderakhshan, Hülya Özkan. "TÜRKİYE'DE İSLAMİ GRUPLARIN İRAN İSLAM DEVRİMİ'NE YAKLAŞIMI VE DEVRİM İHRACI MESELESİ: DERGİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME." *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)*, 2022. <https://doi.org/10.46442/intjcss.1082907>.
- Saeidi, Fateh. "'American Islam': The Politics of Religious Authenticity in Iran." *Digest of Middle East Studies*, 2026. <https://doi.org/10.1111/dome.70030>.
- Tavassoli, Afsaneh, and L Teo. "Islamic Feminist Political Narratives, Reformist Islamic Thought, and Its Discursive Challenges in Contemporary Iran." *Inter-Asia Cultural Studies* 22 (2021): 49–66. <https://doi.org/10.1080/14649373.2021.1886481>.